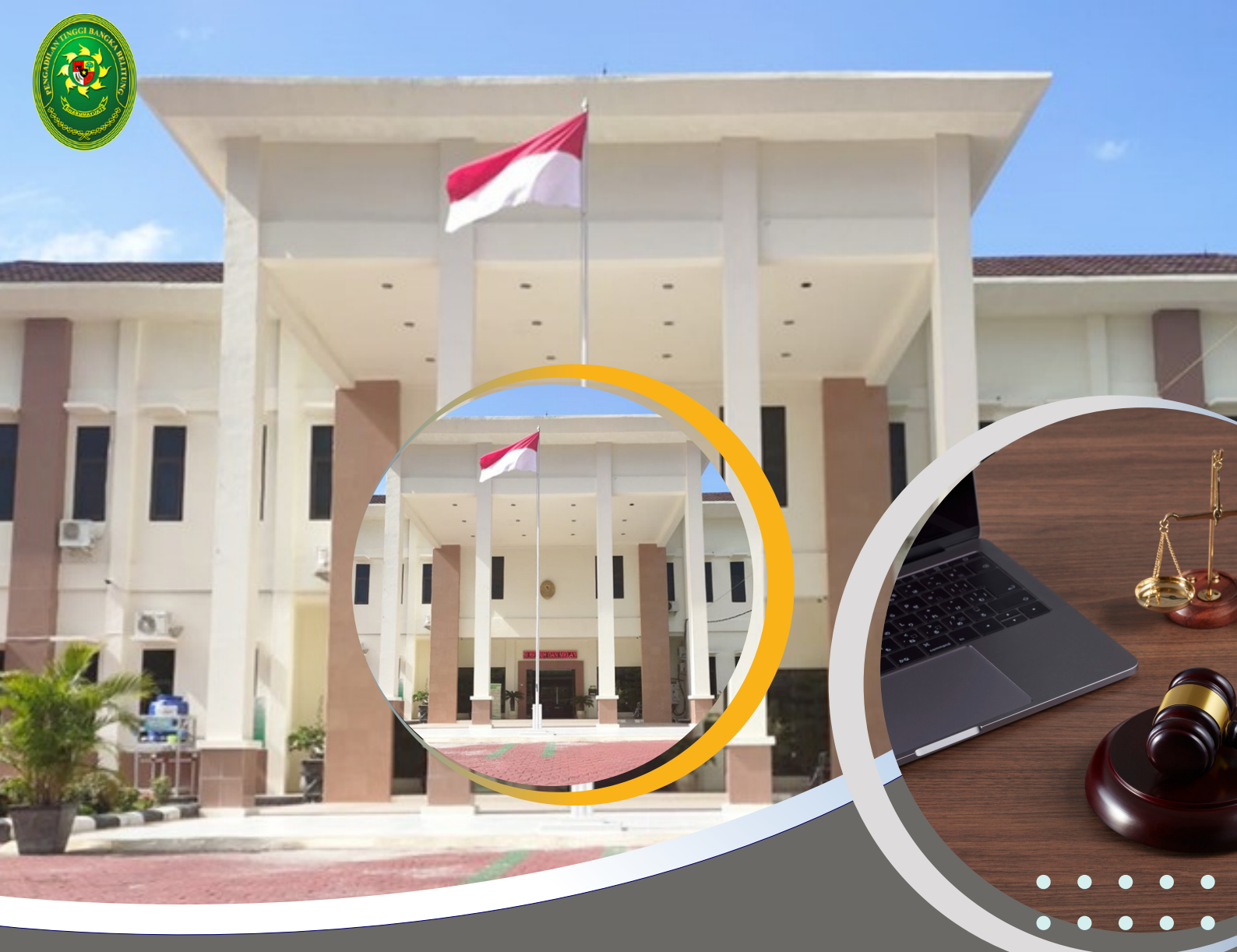




LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2026

PERIODE 30 JUNI 2026

005.03.3000.663404 UAPPAW PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-154/PB/2026 tanggal 06 Juli 2026 hal Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Semester I Tahun 2026. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

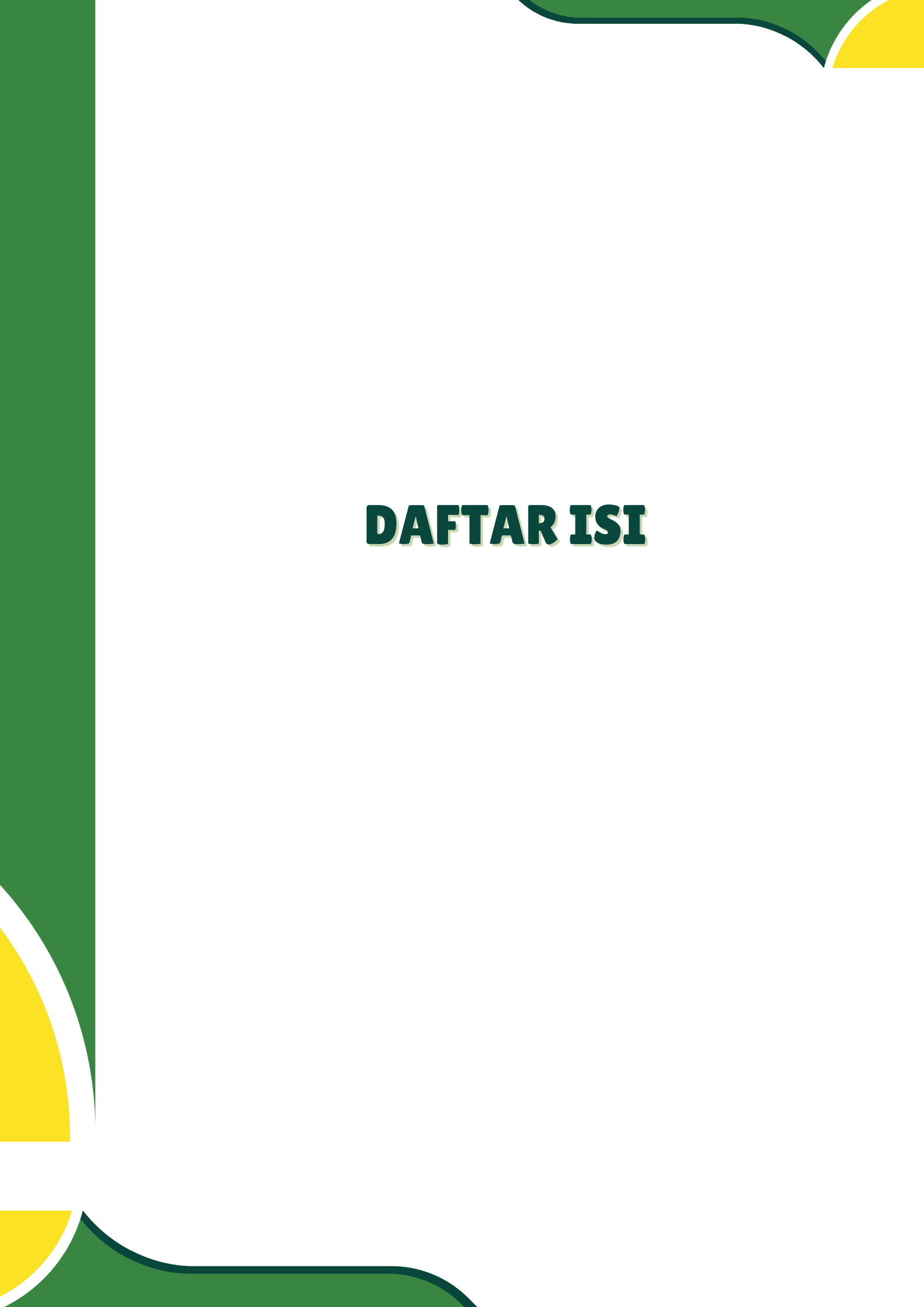
Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Wilayah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pangkalpinang, 23 Juli 2026

Sekretaris,



Rosmala Sari



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

kata Pengantar.....	2
Daftar isi.....	4
Pernyataan Tanggungjawab.....	5
Daftar Tabel	7
Daftar Grafik.....	9
Ringkasan.....	11
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	15
II.Neraca.....	17
III.Laporan Operasional.....	20
IV.Laporan Perubahan Ekuitas.....	23
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	25
A. Penjelasan Umum.....	25
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran.....	36
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	44
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	48
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Ekuitas.....	52
F. Pengungkapan Lainnya.....	55
VI. Lampiran dan Daftar.....	71
1. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap.....	75
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	77
3. Rincian Hibah.....	79
4. Monitoring Penutupan Rekening.....	81
5. Daftar Rekening.....	83
6. Belanja yang Masih Harus Dibayar.....	85
7. Kertas Kerja Telaah.....	88
8. Laporan Realisasi Anggaran (Face).....	94
9. LRA Belanja Per Akun.....	96
10. LRA Pendapatan Per Akun.....	102
11. Neraca.....	106
12. Neraca Percobaan Kas.....	107
13. Neraca Percobaan Akrual.....	108
14. Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal.....	109
15. Laporan Operasional.....	110
16. Laporan Perubahan Ekuitas.....	112
17. Laporan Persediaan.....	113
18. Laporan CRBMN.....	114
19. Laporan Penyusutan.....	115
20. Laporan Barang Pengguna.....	118
21. Laporan Posisi BMN Di Neraca Saldo Awal.....	122
22. Laporan Posisi BMN Di Neraca.....	123

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Penggabungan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tingkat Wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 23 Juli 2026
Sekretaris,



Rosmala Sari

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	11
Tabel 2 Ringkasan Neraca 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	12
Tabel 3 Jenis Kewenangan Satuan Kerja.....	28
Tabel 4 Perhitungan Penyisihan Piutang.....	31
Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tetap.....	33
Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	34
Tabel 7 Rincian Anggaran Awal dan Setelah Revisi per 30 Juni 2026.....	36
Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2026.....	37
Tabel 9 Realisasi PNBPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	37
Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026.....	38
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	39
Tabel 12 Rincian Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	40
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	44
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	45
Tabel 15 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	46
Tabel 16 Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	46
Tabel 17 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	47
Tabel 18 Rincian Utang Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	48
Tabel 19 Rincian Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	48
Tabel 20 Rincian Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2026	49
Tabel 21 Rincian Uang Muka KPPN per 30 Juni 2026.....	49
Tabel 22 Perbandingan Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.....	50
Tabel 23 Rincian Realisasi Pendapatan PNBPN per 30 Juni 2026.....	51
Tabel 24 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	51
Tabel 25 Rincian beban persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	52
Tabel 26 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	53
Tabel 27 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	53
Tabel 28 Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....	54
Tabel 29 Transaksi Antar Entitas.....	52
Tabel 30 Rincian Transfer Masuk 30 Juni 2026.....	56
Tabel 31 Rincian Transfer Keluar 30 Juni 2026.....	56
Tabel 32 Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.....	61
Tabel 33 Penandatanganan Pejabat Perbendaharaan.....	68
Tabel 34 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	71
Tabel 35 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	73
Tabel 36 Rincian Hibah.....	75
Tabel 37 Monitoring Penutupan Rekening 30 Juni 2026.....	77
Tabel 38 Daftar Rekening 30 Juni 2026.....	79



DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....38

Grafik 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026.....39

Grafik 3 Rincian Perbandingan Belanja Barang Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....40

Grafik 4 Rincian Perbandingan Belanja Barang Non Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....41

Grafik 5 Rincian Belanja Barang Persediaan.....41

Grafik 6 Rincian Perbandingan Belanja Barang Persediaan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....42

Grafik 7 Perbandingan Rincian Belanja Jasa 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....42

Grafik 8 Belanja Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....43



RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 UAPPA-W Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada per 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp53.702.500,- atau mencapai 59,30 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp90.554.000,-

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp499.034.940,- atau mencapai 46,30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.077.848.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)			30 Juni 2025 (dalam rupiah)
	Anggaran	Realisasi	% real. thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	90.554.000	53.702.500	59,30	90.554.000
Belanja Negara	1.077.848.000	499.034.940	46,30	1.119.100.000

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.051.033.901,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp1.051.033.901; Aset Tetap (bersih) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (bersih) sebesar Rp.0,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp965.763.248,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp965.763.248,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp85.270.653,-

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)	Naik / Turun (Rp)	%
ASET				
Aset Lancar	1.051.033.901	116.537.633	934.496.268	801,88
Aset Tetap	0	0	0	-
Aset Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH ASET	1.051.033.901	116.537.633	934.496.268	801,88
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	965.763.248	12.966.500	952.796.748	7.348,14
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
JUMLAH KEWAJIBAN	965.763.248	12.966.500	934.496.268	7.348,14
EKUITAS				
Ekuitas	85.270.653	103.571.133	(18.300.480)	(17,67)
JUMLAH EKUITAS	85.270.653	103.571.133	(18.300.480)	(17,67)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.051.033.901	116.537.633	934.496.268	801,88

Tabel 2 Ringkasan Neraca 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp53.702.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp517.335.420,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp463.632.920,-). Surplus(defisit) dari kegiatan non operasional senilai Rp.0,- Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa (Rp463.632.920,-) sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar (Rp463.632.920,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp103.571.133,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp463.632.920,-) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp445.332.440,- sehingga Ekuitas Akhir Entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp85.270.653,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2026, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan rupiah)

No	Uraian	Catatan	30 Juni 2026			30 Juni 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	90.554.000	53.702.500	59,30	52.829.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		90.554.000	53.702.500	59,30	52.829.000
B	BELANJA	B.2				
1.	Belanja Barang	B.2.1	1.077.848.000	499.034.940	46,30	474.533.452
	Jumlah Belanja Negara		1.077.848.000	499.034.940	46,30	474.533.452

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari

II. NERACA PERBANDINGAN

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN
31 DESEMBER 2025 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET			
ASET LANCAR	C.1		0
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	25.300.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	936.520.248	0
Persediaan	C.1.3	89.213.653	116.537.633
JUMLAH ASET LANCAR		1.051.033.901	116.537.633
JUMLAH ASET		1.051.033.901	116.537.633
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.1	936.520.248	12.966.500
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.2.2	3.943.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.2.3	25.300.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		965.763.248	12.966.500
JUMLAH KEWAJIBAN		965.763.248	12.966.500

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
EKUITAS	C.3		
Ekuitas		85.270.653	103.571.133
JUMLAH EKUITAS		85.270.653	103.571.133
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.051.033.901	116.537.633

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	53.702.500	117.696.000
JUMLAH PENDAPATAN		53.702.500	117.696.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Persediaan	D.2	174.356.230	161.584.886
Beban Barang dan Jasa	D.3	288.381.490	273.167.372
Beban Perjalanan Dinas	D.4	54.597.700	51.659.080
JUMLAH BEBAN		517.335.420	486.411.338
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(463.632.920)	(433.582.338)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(463.632.920)	(433.582.338)
POS LUAR BIASA		0	0
Pos Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	D.6	(463.632.920)	(433.582.338)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	E.1	103.571.133	96.735.965
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(463.632.920)	(433.582.338)
Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	E.3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.4	0	0
Transaksi Antar Entitas	E.5	445.332.440	421.704.452
Kenaikan / Penurunan Ekuitas		(18.300.480)	(11.877.886)
Ekuitas Akhir	E.6	85.270.653	84.858.079

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
 Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1 Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- 5.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- 10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMMK.06/2014;
- 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat;
- 12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 13.Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2019 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- 14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 16.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- 17.Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-8/PB/PB.6/2023 tentang Tatacara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
- 18.Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-52/PB/PB.6/2022 tentang Pedoman Penggunaan Modul Piutang SAKTI bagi Kementerian Lembaga/Negara;
- 19.Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 tanggal 03 Juli 2026 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2026.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung merupakan satuan kerja (satker) dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi: "Memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, mengadili perkara sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tingkat Pertama serta melakukan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 53 undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tetang Peradilan Umum".

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tanggal 06 Juli 2004 yang semula termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dialihkan menjadi daerah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memiliki wilayah hukum meliputi : Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan Pada Bulan Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 dan 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru yaitu Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat banding. Pengadilan tinggi yang merupakan Pengadilan tingkat Banding dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya.

Visi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Yang Agung, yang bertujuan agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjadi lembaga yang dihormati, sebagaimana moto Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yaitu "PERISAI" merupakan singkatan dari Persuasif, Edukatif, Implementatif, Solutif, Adaptif, Inspiratif dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah :

- 1.Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- 2.Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3.Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- 4.Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

- 1.Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;
- 2.Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasi penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : Memelihara kepercayaan masyarakat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan.

- Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih;
- Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan;
- Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistic sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, disamping itu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan dengan menerapkan Nilai-Nilai Utama Mahkamah Agung RI, yaitu : Kemandirian, Integritas dan Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, Persamaan yang sama didalam hukum.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Penyusunan Laporan Keuangan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-8/PB/PB.6/2023 tentang Tatacara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. serta Pelaksanaan Rekonsiliasi dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN yang baru. Proses bisnis tersebut dituangkan dalam beberapa modul, yaitu : Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan, dan Modul Administrator. Melalui SAKTI, aplikasi-aplikasi tersebut akan mengakses database yang sama (single database).

Proses migrasi saldo awal dari aplikasi Persediaan, SIMAK dan SAIBA ke aplikasi SAKTI dari satuan kerja yang secara struktural berada dibawah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah dilaksanakan sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-142/PB/2022 Tanggal 14 Juni 2022 dan sudah mengupload Berita Acara Migrasi (BAM) di aplikasi MONSAKTI.

Penyusunan Laporan Keuangan dalam aplikasi SAKTI dengan modul Persediaan, Aset dan GLP (General Lager Pelaporan). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Aset BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Pada Bulan Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 dan 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru, diwilayah Bangka Belitung terdapat penambahan 2 (dua) satker baru yaitu Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Mentok. Sehingga jumlah satuan kerja di lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah 6 (Enam) satker.

Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kode Eselon	Uraian Satker	Jumlah Jenis Kewenangan							
			KP		KD		DK		TP	
			M	T M	M	B M	M	B M	M	B M
1.	03	Pengadilan Negeri Pangkal Pinang			✓					
2.	03	Pengadilan Negeri Sungailiat			✓					
3.	03	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan			✓					
4.	03	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung			✓					
5.	03	Pengadilan Negeri Koba			✓					
6..	03	Pengadilan Negeri Mentok			✓					
JUMLAH					6					

Tabel 3 Jenis Kewenangan Satuan Kerja

Keterangan

M = Menyampaikan LK

BM = Belum Menyampaikan LK

Catatan atas Laporan Keuangan
Penjelasan Umum

A.4 BASIS AKUNTASI

Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan LO

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1.Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2.Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tabel 4 Perhitungan Penyisihan Piutang

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian

Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah;
 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tetap

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Semester 1	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi Penyusutan.

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Selama periode 30 Juni 2026 berjalan, Kantor Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan karena Revisi Halaman III DIPA dan Pemuktahiran POK. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	30 Juni 2026	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
PENDAPATAN		
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	70.000	70.000
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7.400.000	7.400.000
Pendapatan Ongkos Perkara	21.895.000	21.895.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	61.189.000	61.189.000
JUMLAH PENDAPATAN	90.554.000	90.554.000
BELANJA		
Belanja Barang	1.262.548.000	1.077.848.000
JUMLAH BELANJA	1.262.548.000	1.077.848.000

Tabel 7 Rincian Anggaran Awal dan Setelah Revisi per 30 Juni 2026

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp53.702.500,- atau mencapai 59,3 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp90.554.000,-

Keseluruhan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Pendapatan Negara Bukan Pajak : Rp53.702.500,-

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel di bawah :

N o	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	70.000	20.000	28,57
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7.400.000	4.570.000	61,76
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	21.895.000	13.340.000	60,93
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	61.189.000	35.772.500	58,46
	TOTAL PENDAPATAN	90.554.000	53.702.500	59,3

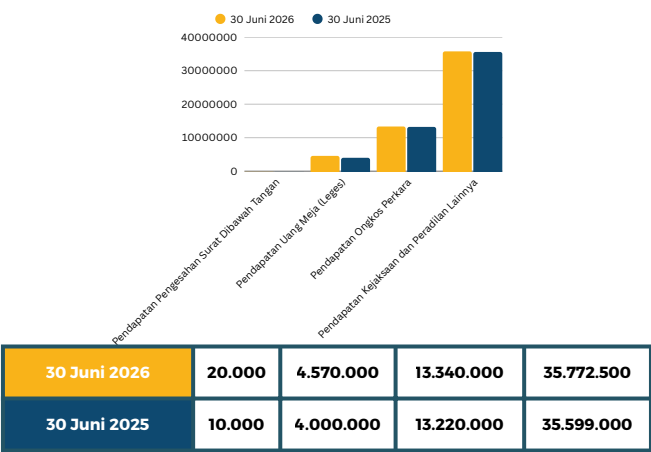
Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2026

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp873.500,- atau 1,65 persen dibandingkan periode 30 Juni 2025, hal ini disebabkan adanya kenaikan jumlah perkara Peradilan sehingga otomatis menaikkan nilai pendapatan pada periode 30 Juni 2026.

Perbandingan realisasi PNBPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel berikut :

N o	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	20.000	10.000	10.000	100
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	4.570.000	4.000.000	570.000	14,25
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	13.340.000	13.220.000	120.000	0,91
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	35.772.500	35.599.000	173.500	0,49
	Total Pendapatan	53.702.500	52.829.000	873.500	1,65

Tabel 9 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025



Grafik I Perbandingan Realisasi PNPB per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

B.2 Belanja

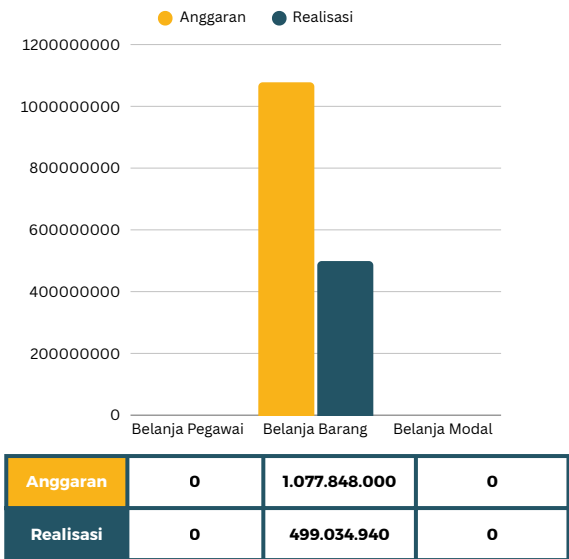
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp499.034.940,- setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar (Rp0,-) atau sebesar 46,3 persen dari anggaran senilai Rp1.077.848.000,-

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1.077.848.000	499.034.940	46,30
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	1.077.848.000	499.034.940	46,30
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	1.077.848.000	499.034.940	46,30

Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026

Realisasi Belanja :
Rp499.034.940,- ▲

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Grafik 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026

Realisasi belanja negara mengalami penurunan sebesar Rp24.501.488,- atau sebesar 5,16 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena pagu anggaran Tahun 2026 terutama pada Belanja Barang Operasional yaitu pengiriman surat dinas pos dan Belanja Barang Non Operasional mengalami peningkatan dibandingkan pagu anggaran Tahun 2025.

Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	499.034.940	474.533.452	24.501.488	5,16
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	499.034.940	474.533.452	24.501.488	5,16

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp499.034.940,- dan Rp474.533.452,-

Realisasi Belanja Barang :
Rp.499.034.940,- ▲

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel di bawah:

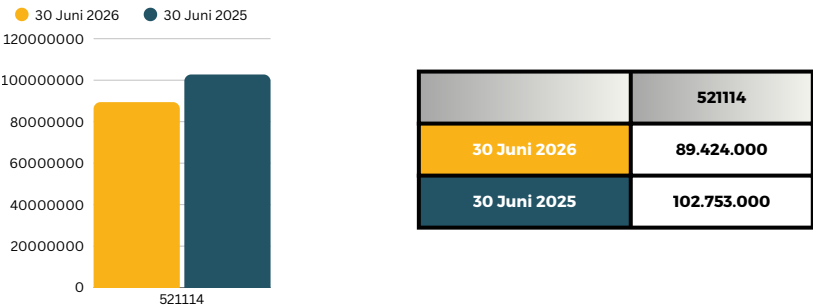
Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Operasional Barang	89.424.000	102.753.000	(13.329.000)	(12,97)
Belanja Barang Non Operasional	106.739.100	96.370.776	10.368.324	10,76
Belanja Persediaan Barang	147.032.250	134.318.900	12.713.350	9,47
Belanja Jasa	101.241.890	91.031.696	10.210.194	11,22
Belanja Perjalanan Dinas	54.597.700	51.374.900	3.222.800	6,27
Total Belanja Bruto	499.034.940	475.849.272	23.185.668	4,87
Pengembalian Belanja	0	1.315.820	(1.315.820)	(100)
Total Belanja Neto	499.034.940	474.533.452	24.501.488	5,16

Tabel 12 Rincian Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp24.501.488,- atau sebesar 5,16 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat Belanja Barang Jasa yang mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan belanja lainnya sebesar 11,22 persen, untuk Belanja Barang Operasional mengalami penurunan sebesar (12,97) persen, disebabkan oleh efisiensi anggaran di Tahun 2026 sehingga otomatis menurunkan realisasi belanja barang operasional. Tahun 2026 tidak Terdapat pengembalian belanja.

B.2.1.1 Belanja Barang Operasional

Rincian Belanja Barang Operasional periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada Grafik 3 di bawah ini:



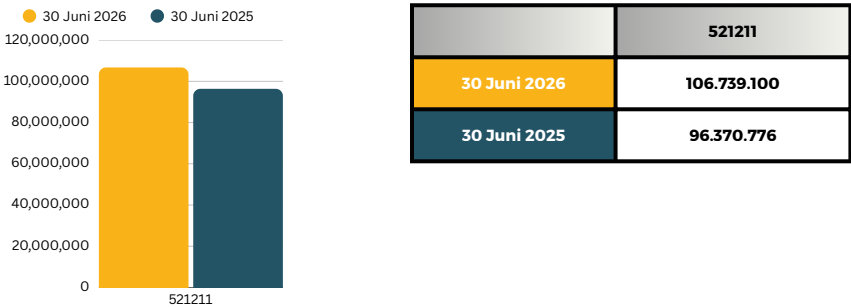
Grafik 3 Rincian Perbandingan Belanja Barang Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Grafik di atas menggambarkan Rincian Belanja Barang Operasional dengan penjelasan sebagai berikut:

- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114) mengalami penurunan sebesar (12,97) persen dikarenakan perbedaan kondisi perkantoran pada periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025, seperti menurunnya pengiriman berkas dokumen perkantoran yang dikirimkan melalui jasa pengiriman seperti laporan perkara, perpanjangan penahanan, dll karena sudah menggunakan ecourt.

B.2.1.2 Belanja Barang Non Operasional

Rincian Belanja Barang Non Operasional periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada Grafik 4 di bawah ini:

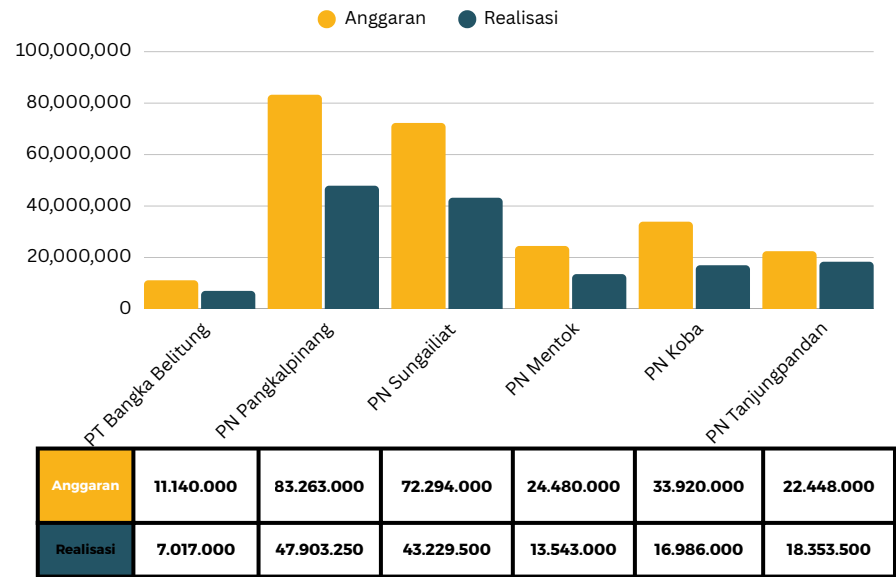


Grafik 4 Rincian Perbandingan Belanja Barang Non Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Sebagaimana ditunjukkan grafik di atas, Belanja Barang Non Operasional mengalami kenaikan sebesar 10,76 persen dibandingkan periode 30 Juni 2025 di periode yang sama. Belanja barang non operasional merupakan belanja bahan (521211) mengalami peningkatan dibandingkan periode 30 Juni 2026 disebabkan adanya peningkatan volume kegiatan s.d. periode 30 Juni 2026 pada masing-masing Satker.

B.2.1.1 Belanja Barang Persediaan

Rincian Belanja Barang Persediaan periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada Grafik 5 di bawah ini:



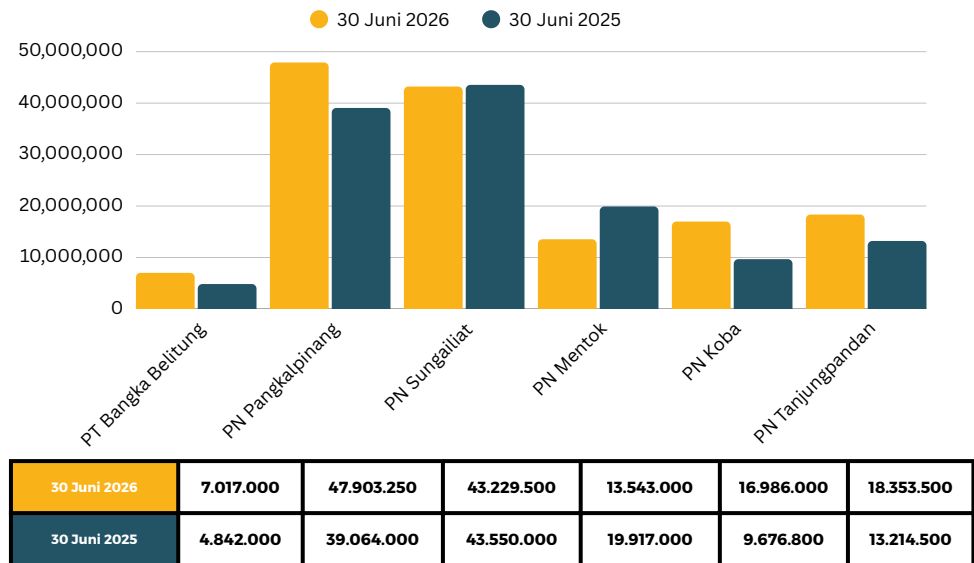
Grafik 5 Rincian Belanja Barang Persediaan

Belanja Barang Operasional : Rp106.739.100,- ▲

Belanja Persediaan : Rp147.032.250,- ▲

Grafik di atas menggambarkan Rincian Belanja Barang Persediaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Belanja Barang Persediaan (521811) mengalami yang kenaikan masih dalam batas wajar sebesar Rp12.713.350,- atau 9,47 persen dibandingkan dengan periode 30 Juni 2025. Hal ini dikarenakan adanya perubahan prioritas dan perbedaan kebutuhan atas Belanja Barang persediaan pada masing-masing Satker.

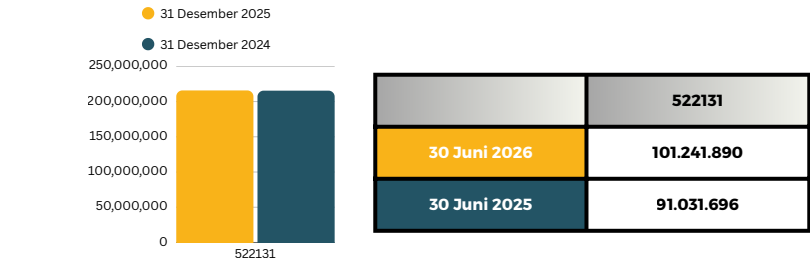


Grafik 6 Perbandingan Belanja Barang Persediaan Periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 (dalam rupiah)

B.2.1.3 Belanja Jasa

Belanja Jasa :
Rp101.241.890,- ▲

Rincian Belanja Jasa Periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada Grafik 7 di bawah ini:



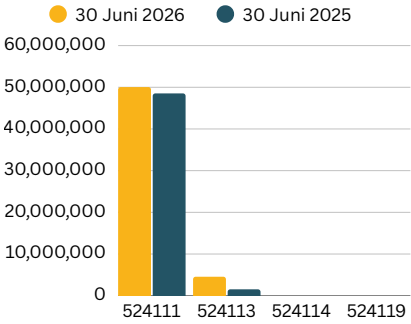
Grafik 7 Perbandingan Rincian Belanja Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Belanja jasa terdiri atas belanja jasa konsultan (522131)
Realisasi belanja jasa konsultan (522131) sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan yang masih dalam batas wajar dibandingkan dengan 30 Juni 2025.

B.2.1.4 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas
Rp54.597.700,- ▲

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas secara kumulatif mengalami kenaikan sebesar Rp3.222.800,- atau 6,27 persen dibanding tahun sebelumnya. Belanja perjalanan dinas terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa (524111), belanja perjalanan dinas dalam kota (524113). Pengembalian Perjalanan Dinas merupakan pengembalian Biaya Representatif pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
Dari dua akun perjalanan dinas tersebut, perjalanan dinas biasa (524111) dan perjalanan dinas dalam kota (524113) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena terdapat efisiensi anggaran Tahun 2025.
Rincian Belanja Perjalanan Dinas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



	524111	524113	524114	524119
30 Juni 2026	50.047.700	4.550.000	0	0
30 Juni 2025	48.529.080	1.530.000	0	0

Grafik 8 Perbandingan Rincian Belanja Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1 Aset Lancar

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp1.051.033.901,- dan Rp116.537.633,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Persediaan	1.051.033.901	116.537.633
	Total Aset Lancar	1.051.033.901	116.537.633

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp39.280.000,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggalneraca.

Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jenis	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Tunai	2.345.000	0
		Kwitansi UP	2.655.000	0
		Bank	0	0

Aset Lancar:
Rp1.051.033.901,- ▲

Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp.116.537.633,- ▲

No	Uraian	Jenis	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
2.	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	-	0	0
3.	Pengadilan Negeri Sungailiat	-	0	0
4.	Pengadilan Negeri Mentok	Tunai	8.000.000	0
		Kwitansi UP	0	0
		Bank	0	0
5.	Pengadilan Negeri Koba	Tunai	7.500.000	0
		Kwitansi UP	0	0
		Bank	0	0
6.	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	Tunai	3.512.000	0
		Kwitansi UP	1.288.000	0
		Bank	0	0
			25.300.000	0

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Rincian uang tunai di Brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp21.357.000,- ,Kwitansi UP yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.943.000,-, Saldo Bank direkening Bendahara sebesar Rp0,-

Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pengadilan Negeri Sungailiat tidak memiliki Uang Persediaan (UP).

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas : Rp936.520.248,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp936.520.248,- dan Rp.0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan berupa Uang Titipan Pihak Ketiga.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Kas Lainnya dan Setara Kas	936.520.248	0
	Total	936.520.248	0

Tabel 15 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

C.1.3 Persediaan

Persediaan : Rp89.213.653,-

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp89.213.653,- dan Rp.116.537.633,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Barang Konsumsi	89.213.653	116.537.633
	Total	89.213.653	116.537.633

Tabel 16 Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Semua persediaan sampai dengan tanggal akhir pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 1916/SEK/PT/W7-U/PL-1-2/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026.
2. Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 1482/SEK.PN.W7-U1/PL1.2.5/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026.
3. Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 3036D/SEK/PT.W7-U/PL1.2.7/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026.
4. Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 294/SEK.PN.W7-U5/PL1.2.5/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026.
5. Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 751b/SEK.PN.W7-U3/PL1.2.5/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026.
6. Pengadilan Negeri Koba Nomor : 1019.b/SEK.PN.W7-U4/PL1.2.5/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026.

C.2 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp965.763.248,- ▲

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp965.763.248,- dan Rp12.966.500,-

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah :

N o	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	965.763.248	12.966.500
	Total	965.763.248	12.966.500

Tabel 17 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

C.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga : Rp936.520.248,- ▲

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp936.520.248,- dan Rp12.966.500,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan uang titipan biaya perkara dan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun Perbandingan Utang Pihak Ketiga pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

N o	Satker	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	Uraian	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	PT Bangka Belitung	-	-	Tagihan Pos Bulan Desember 2025 Dibayarkan Januari 2026	3.999.500
2.	PN Pangkalpinang	Uang Titipan Biaya Perkara Pihak Ketiga	491.204.550	Tagihan Pos Bulan Desember 2025 Dibayarkan Januari 2026	1.758000
3.	PN Tanjungpandan	Uang Titipan Biaya Perkara Pihak Ketiga	161.713.478	Tagihan Pos Bulan Desember 2025 Dibayarkan Januari 2026	4.756.000

No	Satker	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	Urian	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
4.	PN Sungailiat	Uang Titipan Biaya Perkara Pihak Ketiga	100.995.000	Tagihan Pos Bulan Desember 2025 Dibayarka n Januari 2026	2.453.000
5.	PN Mentok	Uang Titipan Biaya Perkara Pihak Ketiga	936.520.248		
6.	PN Koba	Uang Titipan Biaya Perkara Pihak Ketiga	4.623.000		
		TOTAL	936.520.248	-	12.966.500

Tabel 18 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

C.2.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp3.943.000- dan Rp.0.

Utang yang Belum Ditagihkan merupakan utang yang timbul karena Kwitansi GUP yang belum di SPJkan.

Adapun Rincian Utang yang belum ditagihkan pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	Uraian	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	31 Desember 2024 (dalam rupiah)
1.	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	3.943.000	0
	TOTAL	3.943.000	0

Tabel 19 Perbandingan Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Rincian Utang yang belum ditagihkan pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2025 sebagai berikut :

Utang yang Belum
Ditagihkan : Rp3.943.000,-

No.	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)
1.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	2.655.000
2.	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	1.288.000
	Total	3.943.000

Tabel 20 Rincian Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2026

C.2.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN :
Rp25.300.000,- ▲

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp25.300.000,- dan Rp.0-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Pengadilan Negeri Sungailiat tidak memiliki Uang Muka KPPN karena semua transaksi sistem pembayaran secara langsung (LS).

Adapun Rincian Uang Muka dari KPPN pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 sebagai berikut:

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)
1.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	5.000.000
2.	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	0
3.	Pengadilan Negeri Sungailiat	0
4.	Pengadilan Negeri Koba	7.500.000
5.	Pengadilan Negeri Mentok	8.000.000
6.	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	4.800.000
	Total	25.300.000

Tabel 21 Rincian Uang Muka KPPN per 30 Juni 2026

Ekuitas :
Rp85.270.653,-

C.3 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp85.270.653,- dan Rp103.571.133,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan Lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Nilai Ekuitas pada lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah :

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	31 Desember 2025 (dalam rupiah)
1.	Ekuitas	85.270.653	103.571.133
	Total	85.270.653	103.571.133

Tabel 22 Perbandingan Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp53.702.500,- dan Rp52.829.000,-
Rincian Realisasi Pendapatan PNBП seperti berikut ini:

Pendapatan PNBП : Rp53.702.500,-	Uraian	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	70.000	20.000	28,57
	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7.400.000	4.570.000	61.76
	Pendapatan Ongkos Perkara	21.895.000	13.340.000	60,93
	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	61.189.000	35.772.500	58,46
	Total Pendapatan	90.554.000	53.702.500	59,3

Tabel 23 Rincian Realisasi Pendapatan PNBП per 30 Juni 2026

Perbandingan realisasi PNBП per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	20.000	10.000	10.000	100
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	4.570.000	4.000.000	570.000	14,25
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	13.340.000	13.220.000	120.000	0,91
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	35.772.500	35.599.000	173.500	0,49
	Total Pendapatan	53.702.500	52.829.000	873.500	1,65

Tabel 24 Perbandingan Realisasi PNBП per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan diperoleh dari PPengadilan Negeri Sungailiat sebesar Rp10.000, Pengadilan Negeri Koba sebesar Rp10.000,

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan diperoleh dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebesar Rp1.480.000,- Pengadilan Negeri Sungailiat sebesar Rp1.650.000,- pada Pengadilan Negeri Koba sebesar Rp490.000,- Pengadilan Negeri Mentok sebesar Rp530.000,- dan Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebesar Rp860.000,-

Pendapatan Ongkos Perkara berasal dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebesar Rp4.330.000,- Pengadilan Negeri Sungailiat sebesar Rp4.930.000,- Pengadilan Negeri Koba sebesar Rp980.000,- Pengadilan Negeri Mentok sebesar Rp530.000,- dan Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebesar Rp2.570.000,-

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya berasal dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebesar Rp11.634.000,- Pengadilan Negeri Sungailiat sebesar Rp11.714.500,- Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebesar Rp6.606.000,- Pengadilan Negeri Koba sebesar Rp3.181.000,- Pengadilan Negeri Mentok sebesar Rp2.337.000,- dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebesar Rp300.000,-

D.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp174.356.230,- ▲

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp174.356.230,- dan Rp161.584.886. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan;

Beban Persediaan pada 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp12.771.344,- atau 7,90 persen dibandingkan dengan 30 Juni 2025 disebabkan oleh kenaikan pagu anggaran Tahun 2025, sehingga otomatis menaikkan nilai beban persediaan periode 30 Juni 2026;

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025(dalam rupiah)	Perubahan	
			Naik/Turun (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	174.356.230	161.584.886	12.771.344	7,90
Total Beban Persediaan	174.356.230	161.584.886	12.771.344	7,90

Tabel 25 Rincian beban persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2026

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa :
Rp288.381.490,- ▲

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp288.381.490,- dan Rp273.167.372,- Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp15.214.118,- atau 5,57 persen dibandingkan dengan 30 Juni 2025 disebabkan kenaikan pagu anggaran di Tahun 2026.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2026 (dalam rupiah)	30 Juni 2025 (dalam rupiah)	Perubahan	
			Naik/Turun (Rp)	%
Beban Bahan	108.977.100	92.794.176	16.182.924	17,44
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	78.162.500	89.341.500	(11.179.000)	(12,51)
Beban Jasa Konsultan	101.241.890	91.031.696	10.210.194	11,22
Total Beban Jasa	288.381.490	273.167.372	15.214.118	5,57

Tabel 26 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp54.597.700,- dan Rp51.659.080,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp2.938.620,- atau 5,69 persen dibandingkan per 30 Juni 2025 dikarenakan pada Tahun 2026 disebabkan kenaikan pagu anggaran di Tahun 2025.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
			Naik/Turun (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	50.047.700	48.529.080	1.518.620	3,13
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	4.550.000	3.130.000	1.420.000	45,37
Total Beban Perjalanan Dinas	54.597.700	51.659.080	2.938.620	5,69

Tabel 27 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Beban Perjalanan Dinas
Rp54.597.700,- ▲

D.5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
			Naik / Turun (Rp)	%
Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lain	0	0	0	-
Surplus/ Defisit LO dari Kegiatan Non Operasional	0		0	-

Tabel 28 Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Dari tabel diatas terdapat dapat dilihat bahwa per 30 Juni 2026 tidak terdapat pendapatan dari kegiatan non operasinal lainnya dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

D.6 Surplus /Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp463.632.920,-) dan (Rp433.582.338).

Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional :0,-

Surplus/Defisit Laporan Operasional : (Rp463.632.920,-)

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Ekuitas

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal :
Rp103.571.133,-

▲

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 1 Januari 2025 adalah masing-masing sebesar Rp103.571.133,- dan Rp96.735.965,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus(defisit) LO:
(Rp463.632.920,-)

▲

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp463.632.920,-) dan (Rp433.582.338,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah /
Mengurangi Ekuitas: Rp.0,-

Koreksi yang menambah / mengurangi ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0,-

E.4 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset :
Rp.0,-

Penyesuaian Nilai Aset per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas :
Rp445.332.440,-

▼

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp445.332.440,- dan Rp421.704.452-. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BU.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Ditagihkan ke Entitas Lain	499.034.940
Diterima dari Entitas Lain	(53.702.500)
Transfer Masuk	12.316.580
Transfer Keluar	(12.316.580)
Jumlah	445.332.440

Tabel 29 Tansaksi Antar Entitas

E.5.1 Diterima / Ditagihkan dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, Diterima dari Entitas Lain sebesar (Rp53.702.500,-) sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lainnya sebesar Rp499.034.940,-

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset / kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp12.316.580,-

Rincian Transfer Masuk 30 Juni 2026 sebagai berikut

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai (dalam rupiah)
1.	Persediaan Barang Konsumsi	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	12.316.580
Jumlah			12.316.580

Tabel 30 Rincian Transfer Masuk 30 Juni 2026

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan Tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.24.463.138,- yang merupakan transfer Persediaan ke satker-satker di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker Pengirim	Satker Penerima		Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk
1.	663404	099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	117111	Barang Konsumsi	5.863.690
2.	663404	099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	137111	Barang Konsumsi	2.108.338
3.	663404	400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	137111	Barang Konsumsi	1.830.838
4.	663404	402020	PENGADILAN NEGERI Koba	137111	Barang Konsumsi	1.223.668
5.	663404	402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	137111	Barang Konsumsi	1.290.046
Total Transfer Keluar per 30 Juni 2026						12.316.580

Tabel 31 Rincian Transfer Keluar 30 Juni 2026

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp85.270.653,- ▲

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp85.270.653,- dan Rp84.858.079,-

Kenaikan/penurunan ekuitas merupakan penjumlahan selisih antara surplus/ defisit LO dan transaksi antar entitas.

Sehingga nilai kenaikan/penurunan ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp18.300.480,-) dan (Rp11.877.886,-)

F. Pengungkapan Penting Lainnya

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1 Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Semeser I Tahun 2026 ini disusun berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 tanggal 03 Juli 2026 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2026 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2026 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan 6 (enam) satuan kerja di lingkup kerjanya mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Peraturan Direjen Perbendaharaan Nomor : PER-8/PB/2023 tgl 8 Sep 2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Entitas K/L.

F.2 Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

Tidak terdapat Pendapatan dan Belanja Akrual pada periode 30 Juni 2026

F.3 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK baik pada tahun 2025 maupun tahun anggaran yang lalu. Rencana tindak lanjut dan monitoring penyelesaian temuan BPK ini terdapat dalam lampiran pendukung laporan keuangan ini.

F.4 Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga

F.4 .1 Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya :

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai Lembaga Yudikatif mengelola sumber pembiayaan yang berasal dari bagian anggaran pada APBN dan sumber lain untuk pembiayaan perkara perdata baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara dari pihak berperkara yang disebut sebagai biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara. Di samping itu, pada pengadilan juga terdapat uang/barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan.

Yang dimaksud dengan biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara adalah seluruh pengeluaran pada perkara perdata atau penyelesaian perkara tata usaha negara yang dibebankan ke pihak berperkara (penggugat/pemohon) yang terdiri dari:

- Biaya kepaniteraan (griffier kosten) yang lebih dikenal sebagai hak-hak kepaniteraan yang merupakan pungutan atas layanan/jasa pengadilan yang disetor ke kas Negara sebagai PNPB dengan jenis dan tarifnya telah diatur melalui Peraturan Pemerintah.
- Ongkos perkara/biaya proses yang merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi antara lain biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan biaya biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara tersebut.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis bahwa dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara, biaya perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada proses awal dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali karenanya negara tidak mengalokasikan anggarannya atas biaya perkara perdata pada APBN melalui DIPA, kecuali atas perkara prodeo bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan nilai gugatan dibawah 150 juta.

Selain biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara pada pengadilan juga terdapat uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara yaitu uang konsinyasi, uang atas barang bukti perkara dan uang atas jaminan penangguhan penahanan yang dititipkan dan/atau disimpan di kepaniteraan dan juga uang-uang lain yang tersimpan di pengadilan antara lain uang sisa hasil pelaksanaan lelang aset debitur (pihak yang berhutang) yang dijaminkan setelah dibayarkan seluruh kewajiban pihak debitur kepada kreditur (pihak yang berpiutang/ yang mengajukan klaim) masih terdapat sisa yang belum dikembalikan kepada debitur, dan/atau uang lainnya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara.

Biaya proses penyelesaian perkara atau biaya perkara dalam pedoman ini disebut sebagai uang titipan pihak ketiga dan uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara di kepaniteraan peradilan termasuk uang lainnya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara disebut sebagai uang titipan pihak ketiga lainnya.

Uang titipan pihak ketiga dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan dan dicatat pada Buku Keuangan Perkara, dikelola secara efektif, efisien, transparan, serta diungkapkan dalam CaLK Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Sebagai wujud dari akuntabilitas, transparansi dan asas full disclosure atas pelaporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia maka terhadap uang titipan pihak ketiga lainnya dicatat pada Buku Keuangan Perkara Lainnya serta diungkapkan dalam CaLK Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya khususnya pada Kebijakan Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga, diberikan pengungkapan sebagai berikut:

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2026 yaitu sebesar Rp.945.896.699,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung saldo uang perkara di rekening koran per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.0,- sedangkan saldo biaya perkara di brankas per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp150.000,-
2. Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang saldo uang perkara di rekening koran per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp491.204.550,- sedangkan saldo biaya perkara di brankas per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp3.466.995,-
3. Pada Pengadilan Negeri Sungailiat saldo uang perkara di rekening koran per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp100.995.000,- sedangkan saldo biaya perkara di brankas per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp3.255.500,-
4. Pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan saldo uang perkara di rekening koran per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp161.713.478,- sedangkan saldo biaya perkara di brankas per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp2.063.456,-
5. Pada Pengadilan Negeri Koba saldo uang perkara di rekening koran per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp4.623.000,- sedangkan saldo biaya perkara di brankas per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp385.000,-
6. Pada Pengadilan Negeri Mentok saldo uang perkara di rekening koran per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp177.984.220,- sedangkan saldo biaya perkara di brankas per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp55.500,-

TABEL 32 REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN PERKARA WILAYAH PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG PER 30 JUNI 2026

N o.	Nama Satker	Uraian	Keuangan Perkara				Tempat Penyimpanan Uang	
			Sisa Awal	Masuk	Keluar	Sisa	Dalam Bank	Dalam Brankas
1.	PT BANGKA BELITUNG	Biaya Perkara	450.000	1.950.000	2.250.000	150.000	-	150.000
		Biaya Eksekusi	-	-	-	-	-	-
		Konsinyasi	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		450.000	1.950.000	2.250.000	150.000	-	150.000
2.	PN PANGKALPINANG	Biaya Perkara	21.059.075	94.732.000	83.892.700	31.898.375	30.744.380	1.153.995
		Biaya Eksekusi	8.518.670	33.565.000	10.616.000	31.467.670	31.467.670	-
		Konsinyasi	428.992.500	-	-	428.992.500	428.992.500	-
		Titipan Pidana	-	-	-	-	-	-
		PHI	2.046.000	4.888.000	4.621.000	2.313.000	-	2.313.000
		Eksekusi PHI	4794.000	-	4.794.000	-	-	-
	TOTAL		465.410.245	133.185.000	103.923.700	494.671.545	491.204.550	3.466.995

N o.	Nama Satker	Uraian	Keuangan Perkara				Tempat Penyimpanan Uang	
			Sisa Awal	Masuk	Keluar	Sisa	Dalam Bank	Dalam Brankas
3.	PN MENTOK	Biaya Perkara	771.000	3.661.500	1.251.500	3.181.000	3.125.500	55.000
		Biaya Eksekusi	-	-	-	-	-	-
		Konsinyasi	174.858.720	-	-	174.858.720	174.858.720	-
		Titipan Pidana	-	-	-	-	-	-
		Biaya Proses	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		175.629.720	3.661.500	1.251.500	178.039.720	177.984.220	55.000
4.	PN Koba	Biaya Perkara	2.620.000	20.887.000	18.888.000	4.612.000	4.612.000	7.000
		Biaya Eksekusi	-	-	-	-	-	-
		Konsinyasi	-	-	-	-	-	-
		Titipan Pidana	-	-	-	-	-	-
NB : Terdapat selisih sebesar Rp11.000,- pada rekening RPL dengan pencatatan keuangan perkara dikarenakan adanya pembayaran PNPB salinan putusan para pihak melalui e-court yang belum dikeluarkan namun dikeluarkan dibulan Juli.								
	TOTAL		2.620.000	20.887.000	18.888.000	4.612.000	4.612.000	7.000

No.	Nama Satker	Uraian	Keuangan Perkara				Tempat Penyimpanan Uang	
			Sisa Awal	Masuk	Keluar	Sisa	Dalam Bank	Dalam Brankas
5.	PN SUNGAILIAT	Biaya Perkara	53.011.000	126.086.000	116.494.500	62.602.500	59.347.000	3.255.500
		Biaya Eksekusi	36.190.500	8.042.500	2.585.000	41.468.000	41.648.000	-
		Konsinyasi	-	-	-	-	-	-
		Titipan Pidana	-	-	-	-	-	-
		Biaya Proses	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		89.201.500	134.128.500	119.079.500	104.250.500	100.995.00	3.255.500
6.	PN TANJUNGPANDAN	Biaya Perkara	30.588.366	43.568.500	37.742.500	36.414.366	161.713.478	2.063.456
		Biaya Eksekusi	-	59.214.000	2.372.000	56.842.000	-	-
		Konsinyasi	70.520.568	-	-	70.520.568	-	-
		Titipan Pidana	-	-	-	-	-	-
		Biaya Proses	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		101.108.934	102.782.500	40.114.500	163.776.934	161.713.478	2.063.456

F.5 Revisi DIPA

Sampai dengan 30 Juni 2026 satuan-satuan kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah melakukan beberapa kali revisi dengan rincian sebagai berikut :

PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah melakukan 4 (empat) kali revisi DIPA yaitu :

- 1.Revisi I tanggal 24 Desember 2025 tentang Direktif Presiden.
- 2.Revisi II tanggal 10 Februari 2026 tentang Revisi Hal III DIPA dan POK.
- 3.Revisi III tanggal 10 April 2026 tentang Revisi Hal III DIPA dan POK.
- 4.Revisi IV tanggal 09 Juni 2026 tentang Revisi POK.

PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG

Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sudah melakukan revisi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- 1.Revisi I tanggal 24 Desember 2025 tentang Direktif Presiden.
- 2.Revisi II tanggal 11 Februari 2026 tentang Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA Triwulan I dan Revisi POK
- 3.Revisi III tanggal 15 April 2026 tentang Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA Triwulan I dan Revisi POK .

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Pada Pengadilan Negeri Sungailiat sudah melakukan 2 (dua) kali revisi DIPA yaitu :

- 1.Revisi I tanggal 19 Februari 2026 tentang Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan Halaman III DIPA.
- 2.Revisi II tanggal 08 Mei 2026 tentang Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan Halaman III DIPA dan Revisi POK.

PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

Pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan sudah melakukan revisi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1.Revisi I tanggal 19 Februari 2026 tentang Revisi Pemuktahiran Data Hasil Revisi POK Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Tetap Lainnya.
- 2.Revisi II tanggal 06 Mei 2026 tentang Revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA dan Revisi POK.

PENGADILAN NEGERI KOKA

Pada Pengadilan Negeri Koka sudah melakukan 4 (empat) kali revisi DIPA yaitu :

1. Revisi I tanggal 25 Desember 2025 tentang Direktif Presiden.
2. Revisi II tanggal 13 Februari 2026 Revisi halaman III DIPA.
3. Revisi III tanggal 16 April 2026 tentang Revisi halaman III DIPA.
4. Revisi IV tanggal 08 Mei 2026 tentang Revisi halaman III DIPA.

PENGADILAN NEGERI MENTOK

Pada Pengadilan Negeri Mentok sudah melakukan revisi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Revisi I tanggal 24 Desember 2025 tentang Direktif Presiden.
2. Revisi II tanggal 13 Februari 2026 tentang Revisi Halaman III DIPA dan Revisi POK.

F.6 Penandatanganan Pejabat Perbendaharaan

Pada periode Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 terdapat perubahan Pejabat Perbendaharaan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Negeri Koba. Susunan pejabat perbendaharaan di enam Satker lingkup Wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjadi sebagaimana tabel berikut:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Kuasa Pengguna Anggaran	Rosmala Sari	Rosmala Sari
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fitriyanti Utari	Fitriyanti Utari
	PPSPM	Nur Kamalia	Nur Kamalia
	Bendahara	Dessy Triastuti	Dessy Triastuti
Pengadilan Negeri Pangkalpinang	Kuasa Pengguna Anggaran	Epiyanda	Epiyanda
	Pejabat Pembuat Komitmen	Tri Palupi	Tri Palupi
	PPSPM	Suhartono	Suhartono
	Bendahara	Malviana	Malviana
Pengadilan Negeri Sungailiat	Kuasa Pengguna Anggaran	Jovan Meril	Jovan Meril
	Pejabat Pembuat Komitmen	Dewi Aprilia Puspita Ningrum	Dewi Aprilia Puspita Ningrum
	PPSPM	Lisa Wahyuni	Lisa Wahyuni
	Bendahara	Zulistia Novitri	Zulistia Novitri
Pengadilan Negeri Koba	Kuasa Pengguna Anggaran	Agustini	Irhansyah
	Pejabat Pembuat Komitmen	Agustini	Irhansyah
	PPSPM	Oskar Syaifullah	Oskar Syaifullah
	Bendahara	Eko Arfandi	Eko Arfandi

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Pengadilan Negeri Mentok	Kuasa Anggaran Pengguna	Sevia Dwi Krisnawaty	Sevia Dwi Krisnawaty
	Pejabat Komitmen Pembuat	Sevia Dwi Krisnawaty	Sevia Dwi Krisnawaty
	PPSPM	Irmaya Sari Purba	Irmaya Sari Purba
	Bendahara	Risnauli Landongna Sinamo	Risnauli Landongna Sinamo
Pengadilan Negeri Tanjungpandan	Kuasa Anggaran Pengguna	Ilman Saparis Prabakti	Ilman Saparis Prabakti
	Pejabat Komitmen Pembuat	Alvin Permana	Alvin Permana
	PPSPM	Willyam Blasius Siregar	Willyam Blasius Siregar
	Bendahara	Yos Agussetiawan Semendawai	Yos Agussetiawan Semendawai

Tabel 33 Penandatanganan Pejabat Perbendaharaan



LAMPIRAN DAN DAFTAR



RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Tabel 34 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

Kode							
Aset Tetap							
Kuantitas							
Nilai Perolehan							
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan							
Beban Penyusutan Per 30 Juni 2026							
Total Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2026							
Nilai Buku							

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

Tabel 35 Rincian KDP untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Dilanjutk an	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari

HIBAH

Tabel 36 Rincian Hibah Langsung untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

No	Kode Satker	Nama Satker	Nomor Register	Bentuk Hibah	Nilai Hibah	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari



MONITORING PENUTUPAN REKENING

Tabel 37 Monitoring Penutupan Rekening Kementerian / Lembaga untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

N o	Nama Satker	Kemente rian Negara / Lembaga	BA-ES 1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Tanggal Penutupan	Alasan Penutupan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari

DAFTAR REKENING

Tabel 38 Rincian Daftar Rekening Periode 30 Juni 2026

No	Nama Satker	Kementerian dan Negara / Lembaga	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rekening atas nama	Bank / Kantor Pos	Jumlah Uang
1.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Mahkamah Agung	Virtual	654456634041000	BPg 015 Pengadilan Tinggi Babel-03	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	BRI CAB. PANGKALPINANG	Rp.0.-
2.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	Mahkamah Agung	Giro	0063-01-001681- 30-0	RPL 015 PT Babel Utk Biaya Perkara	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	BRI Cabang Pangkalpinang	Rp.0.-
3.	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	Mahkamah Agung	Virtual	654440992341000	BPg 015 PN PANGKALPINANG-03	Pengadilan Pangkalpinang	BRI Cabang Pangkalpinang	Rp.0-
4.	Pengadilan Negeri Pangkalpinang	Mahkamah Agung	Giro	0063-01-001686- 30-0	RPL 015 PN PANGKALPINANG UTK BIAYA PERKARA	Pengadilan Pangkalpinang	BRI Cabang Pangkalpinang	Rp.491.204.550.-
5.	Pengadilan Negeri Sungailiat	Mahkamah Agung	Virtual	654444099235100 0	BPg 015 PN Sungailiat 03	Pengadilan Negeri Sungailiat	BRI Cabang Sungailiat	Rp.-
6.	Pengadilan Negeri Sungailiat	Mahkamah Agung	Giro	0324-01-000299- 30-0	RPL 015 PN Sungailiat utk Biaya Perkara	Pengadilan Negeri Sungailiat	BRI Cabang Sungailiat	Rp100.995.000.-
7.	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	Mahkamah Agung	Virtual	654444400601000	BPg 107 PN TANJUNGPANDAN(03)	Pengadilan Tanjungpanda	BRI Cabang Tanjungpandan	Rp.0.-
8.	Pengadilan Negeri Tanjungpandan	Mahkamah Agung	Giro	0131-01-000470- 30-9	RPL 107 PN TC PANDAN	Pengadilan Tanjungpanda	BRI Tanjungpandan	Rp161.713.478.-
9.	Pengadilan Negeri Koba	Mahkamah Agung	Virtual	654444020201000	a.n BPG 015 PN Koba 402020	Pengadilan Negeri Koba	BRI Cabang Koba	Rp.0.-
10.	Pengadilan Negeri Koba	Mahkamah Agung	Giro	2194-01-00- 019030-1	RPL 015 PDT PN Koba	Pengadilan Negeri Koba	BRI Cabang Koba	Rp4.623.000.-

No	Nama Satker	Kementerian an Negara /Lembaga	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rekening atas nama	Bank / Kantor Pos	Jumlah Uang
11.	Pengadilan Negeri Mentok	Mahkamah Agung	Virtual	65444402021000	BPG 015 PN MENTOK 402021	Pengadilan Negeri Mentok	BRI Cabang Mentok	Rp.-
12.	Pengadilan Negeri Mentok	Mahkamah Agung	Ciro	2090-01-000230- 30-1	RPL 015 PDT PN MENTOK BIAYA PERKARA	Pengadilan Negeri Mentok	BRI Cabang Mentok	Rp177.984.220.-

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Rosmala Sari

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
SEMESTER I TAHUN 2026

Kode dan Nama UAPPAW : (005) MAHKAMAH AGUNG RI
 Kode dan Nama Eselon 1 : (03) BADAN PERADILAN UMUM
 Kode dan Nama K/L : (3000) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MYINTRESS			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√	Sama
PENGECEKAN PADA MYINTRESS			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	N/A	N/A
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		√
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		√
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		√
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		√
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		√
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√
a.	Pagu/DIPA		√
b.	Estimasi PNBP		√
c.	Belanja		√
d.	Pengembangan Belanja		√
e.	Pendapatan		√
f.	Pengembangan Belanja		√
g.	Kas BLU		√

	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal			
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
			√	Tidak
	Daftar MYINTRESS			
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak	Ada	Tidak	Seharusnya
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Ada/Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan			
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)			
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada			
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU			
		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"	N/A	N/A	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)	N/A	N/A	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)	N/A	N/A	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)	N/A	N/A	Tidak
	Terkait Satker BLU			
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A	N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah	N/A	N/A	
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu	N/A	N/A	Tidak

Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas				Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		√		Tidak	
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√		Tidak	
Hibah Langsung						
		Ada	Tidak	Seharusnya		
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke						
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		√		Ada/Tidak	
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√		Ada/Tidak	
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A		Ya	
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A		Ya	
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A		Ya	
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya						
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A		Ya	
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal						
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	-				
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-				
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√		Tidak	
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)						
		Ya	Tidak	Seharusnya		
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√		Ya/Tidak	
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A		Ya/Tidak	
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual	N/A	N/A		Ya	
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)						
		Ya	Tidak	Seharusnya		
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√		Ya/Tidak	
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun	N/A	N/A		Ya/Tidak	
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CalK						
		N/A	N/A			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian						
		Ya	Tidak	Seharusnya		
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CalK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√		Ya/Tidak	
PENGECEKAN NERACA						
Pengecekan Pos-pos Neraca				Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√			Ya	
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√			Ya	
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√			Ya	
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√			Ya	
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	N/A	N/A		Ya	
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√		Tidak	
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√			Ya	
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√		Tidak	
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL						
Pengecekan Pos-pos LO				Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√		Tidak	
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√		Tidak	
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√		Tidak	
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√			Ya	
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√		Ya/Tidak	
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√			Ya/Tidak	
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√		Tidak	

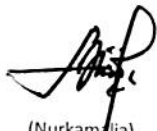
PENGECHEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE				
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Ya/Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	Ya	Tidak	Seharusnya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal	N/A	N/A	Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar	N/A	N/A	Ya
PENGECHEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P				
1	Terdapat saldo negatif di LRAB	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		√	Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
			√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya				
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	Ya	Tidak	Seharusnya
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akruai?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	Ya	Tidak	Seharusnya
	Jika Ya, ada realisasi akun 520XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	√	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?	N/A	N/A	Ya
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	√	Ya/Tidak
		N/A	N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akruai pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akruai	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akruai	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akruai	√		Ya/Tidak
		√		Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
LPSAL BLU				
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Tidak
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SilPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya

6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A	Ya
LAK BLU				
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	N/A	N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

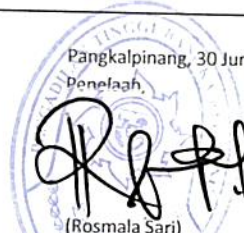
Mengetahui
Pejabat Penyusun LKRI,



(Nurkamalia)
NIP.198601222006042001

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Penelaah,



(Rosmala Sari)
NIP.198107042006042004



CETAKAN MONSAKTI

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

UAPPAW : BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG 005033000KD

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	90,554,000	53,702,500	(36,851,500)	59.30	131,561,000	52,829,000	(78,732,000)	40.16
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	90,554,000	53,702,500	(36,851,500)	59.30	131,561,000	52,829,000	(78,732,000)	40.16
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	90,554,000	53,702,500	(36,851,500)	59.30	131,561,000	52,829,000	(78,732,000)	40.16
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,077,848,000	499,034,940	(578,813,060)	46.30	1,119,100,000	474,533,452	(644,566,548)	42.4
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,077,848,000	499,034,940	(578,813,060)	46.30	1,119,100,000	474,533,452	(644,566,548)	42.4
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

UAPPAW : BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG 005033000KD

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,077,848,000	499,034,940	(578,813,060)	46.30	1,119,100,000	474,533,452	(644,566,548)	42.4
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/26 8:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	222,420,000	210,084,000	89,424,000	0	89,424,000	42.57	120,660,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	222,420,000	210,084,000	89,424,000	0	89,424,000	42.57	120,660,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	219,043,000	183,551,000	106,739,100	0	106,739,100	58.15	76,811,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	219,043,000	183,551,000	106,739,100	0	106,739,100	58.15	76,811,900
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	307,407,000	247,545,000	147,032,250	0	147,032,250	59.4	100,512,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	307,407,000	247,545,000	147,032,250	0	147,032,250	59.4	100,512,750
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	252,000,000	252,000,000	101,241,890	0	101,241,890	40.18	150,758,110
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	252,000,000	252,000,000	101,241,890	0	101,241,890	40.18	150,758,110
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139,460,000	67,300,000	50,047,700	0	50,047,700	74.37	17,252,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,900,000	10,050,000	4,550,000	0	4,550,000	45.27	5,500,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38,880,000	38,880,000	0	0	0	0	38,880,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68,438,000	68,438,000	0	0	0	0	68,438,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	261,678,000	184,668,000	54,597,700	0	54,597,700	29.91	130,070,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	39.99	578813060
	JUMLAH BELANJA	1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	46.3	578,813,060

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA/JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/26 8:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_wilayah_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG							
52	BELANJA BARANG	322,300,000	282,093,000	121,643,651	0	121,643,651	43.12	160,449,349
	Jumlah Belanja099234PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	322,300,000	282,093,000	121,643,651	0	121,643,651	43.12	160,449,349
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT							
52	BELANJA BARANG	234,080,000	206,654,000	115,374,000	0	115,374,000	55.83	91,280,000
	Jumlah Belanja099235PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	234,080,000	206,654,000	115,374,000	0	115,374,000	55.83	91,280,000
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN							
52	BELANJA BARANG	137,500,000	120,290,000	72,548,589	0	72,548,589	60.31	47,741,411
	Jumlah Belanja400601PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	137,500,000	120,290,000	72,548,589	0	72,548,589	60.31	47,741,411
402020	PENGADILAN NEGERI KOBABELANJA BARANG	133,640,000	119,216,000	50,909,500	0	50,909,500	42.7	68,306,500
	Jumlah Belanja402020PENGADILAN NEGERI KOBABELANJA BARANG	133,640,000	119,216,000	50,909,500	0	50,909,500	42.7	68,306,500
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOKBELANJA BARANG	121,860,000	109,112,000	53,128,000	0	53,128,000	48.69	55,984,000
	Jumlah Belanja402021PENGADILAN NEGERI MENTOKBELANJA BARANG	121,860,000	109,112,000	53,128,000	0	53,128,000	48.69	55,984,000
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNGBELANJA BARANG	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA/JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/26 8:22 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_wilayah_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	Jumlah Belanja663404PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800
	JUMLAH BELANJA	1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	286.17	578,813,060

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SATUAN KERJA
TINGKAT UAPPAW
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPAW : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 21/07/26 8:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	322,300,000	282,093,000	121,643,651	0	121,643,651	43.12	160,449,349
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	234,080,000	206,654,000	115,374,000	0	115,374,000	55.83	91,280,000
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	137,500,000	120,290,000	72,548,589	0	72,548,589	60.31	47,741,411
402020	PENGADILAN NEGERI KOBAB	133,640,000	119,216,000	50,909,500	0	50,909,500	42.7	68,306,500
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	121,860,000	109,112,000	53,128,000	0	53,128,000	48.69	55,984,000
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800
JUMLAH		1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	47.695	578,813,060

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT UAPPAW
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPAW : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 21/07/26 8:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	222,420,000	210,084,000	89,424,000	0	89,424,000	42.57	120,660,000
521211	Belanja Bahan	215,043,000	179,551,000	106,739,100	0	106,739,100	59.45	72,811,900
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	307,407,000	247,545,000	147,032,250	0	147,032,250	59.4	100,512,750
522131	Belanja Jasa Konsultan	252,000,000	252,000,000	101,241,890	0	101,241,890	40.18	150,758,110
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139,460,000	67,300,000	50,047,700	0	50,047,700	74.37	17,252,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,900,000	10,050,000	4,550,000	0	4,550,000	45.27	5,500,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,151,230,000	966,530,000	499,034,940	0	499,034,940	51.63	467,495,060
	JUMLAH RUPIAH MURNI	1,151,230,000	966,530,000	499,034,940	0	499,034,940	51.63	467,495,060
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38,880,000	38,880,000	0	0	0	0	38,880,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68,438,000	68,438,000	0	0	0	0	68,438,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH PNBP	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	TOTAL	1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	46.3	578,813,060

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT UAPPAW
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAPPAW : 005033000KD **BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG**

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 21/07/26 8:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_uappa

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1,151,230,000	966,530,000	499,034,940	0	499,034,940	51.63	467,495,060
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	1,151,230,000	966,530,000	499,034,940	0	499,034,940	51.63	467,495,060
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	1,151,230,000	966,530,000	499,034,940	0	499,034,940	51.63	467,495,060
04	PNBP							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH BELANJA PNBP	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH	1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	46.3	578,813,060

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD

MAHKAMAH AGUNG
BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 21/07/26 8:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pond_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	70,000	20,000	0	20,000	28.57
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7,400,000	4,570,000	0	4,570,000	61.76
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	21,895,000	13,340,000	0	13,340,000	60.93
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	61,189,000	35,772,500	0	35,772,500	58.46
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	90,554,000	53,702,500	0	53,702,500	59.3
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	90,554,000	53,702,500	0	53,702,500	59.3
	JUMLAH PENDAPATAN	90,554,000	53,702,500	0	53,702,500	59.3

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.P.W.3
Tanggal : 21/07/26 8:06 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_uappaw

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	40,000	0	0	0	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2,310,000	1,480,000	0	1,480,000	64.07
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	7,110,000	4,330,000	0	4,330,000	60.9
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22,876,000	11,634,000	0	11,634,000	50.86
	JUMLAH PENDAPATAN (099234) - PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	32,336,000	17,444,000	0	17,444,000	43.96
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	20,000	10,000	0	10,000	50
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	3,100,000	1,650,000	0	1,650,000	53.23
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	6,645,000	4,930,000	0	4,930,000	74.19
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	18,856,000	11,714,500	0	11,714,500	62.13
	JUMLAH PENDAPATAN (099235) - PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	28,621,000	18,304,500	0	18,304,500	59.89
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10,000	0	0	0	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	990,000	860,000	0	860,000	86.87
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	5,470,000	2,570,000	0	2,570,000	46.98
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10,405,000	6,606,000	0	6,606,000	63.49
	JUMLAH PENDAPATAN (400601) - PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	16,875,000	10,036,000	0	10,036,000	49.34

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD **BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG**

Kode Lap : LRA.P.W.3
Tanggal : 21/07/26 8:06 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_uappaw

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402020	PENGADILAN NEGERI KOBA					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10,000	0	10,000	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	520,000	490,000	0	490,000	94.23
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	1,750,000	980,000	0	980,000	56
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	4,883,000	3,181,000	0	3,181,000	65.14
	JUMLAH PENDAPATAN (402020) - PENGADILAN NEGERI KOBA	7,153,000	4,661,000	0	4,661,000	53.84
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK					
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	480,000	90,000	0	90,000	18.75
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	920,000	530,000	0	530,000	57.61
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3,389,000	2,337,000	0	2,337,000	68.96
	JUMLAH PENDAPATAN (402021) - PENGADILAN NEGERI MENTOK	4,789,000	2,957,000	0	2,957,000	48.44
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG					
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	780,000	300,000	0	300,000	38.46
	JUMLAH PENDAPATAN (663404) - PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	780,000	300,000	0	300,000	38.46
	JUMLAH PENDAPATAN	90,554,000	53,702,500	0	53,702,500	50.59

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD

MAHKAMAH AGUNG
BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.P.W.3
Tanggal : 21/07/26 8:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_uappaw

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	32,336,000	17,444,000	0	17,444,000	0.54
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	16,875,000	10,036,000	0	10,036,000	0.59
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	780,000	300,000	0	300,000	0.38
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	28,621,000	18,304,500	0	18,304,500	0.64
402020	PENGADILAN NEGERI KOBAS	7,153,000	4,661,000	0	4,661,000	0.65
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	4,789,000	2,957,000	0	2,957,000	0.62
JUMLAH		90,554,000	53,702,500	0	53,702,500	0.59

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

UAPPAW : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	25,300,000	0	25,300,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	936,520,248	0	936,520,248	0.00
Persediaan	89,213,653	116,537,633	(27,323,980)	(23.45)
JUMLAH ASET LANCAR	1,051,033,901	116,537,633	934,496,268	801.88
JUMLAH ASET	1,051,033,901	116,537,633	934,496,268	801.88
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	936,520,248	12,966,500	923,553,748	7,122.61
Utang Yang Belum Ditagihkan	3,943,000	0	3,943,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	25,300,000	0	25,300,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	965,763,248	12,966,500	952,796,748	7,348.14
JUMLAH KEWAJIBAN	965,763,248	12,966,500	952,796,748	7,348.14
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	85,270,653	103,571,133	(18,300,480)	(17.67)
JUMLAH EKUITAS	85,270,653	103,571,133	(18,300,480)	(17.67)
JUMLAH EKUITAS	85,270,653	103,571,133	(18,300,480)	(17.67)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,051,033,901	116,537,633	934,496,268	801.88

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	499,034,940
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	53,702,500	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	20,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	0	4,570,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	13,340,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	35,772,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	89,424,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	106,739,100	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	147,032,250	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	101,241,890	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,047,700	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,550,000	0
JUMLAH			552,737,440	552,737,440

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	25,300,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	936,520,248	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	89,213,653	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	936,520,248
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	3,943,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	25,300,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	499,034,940
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	53,702,500	0
0.0	313211	Transfer Keluar	12,316,580	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	12,316,580
0.0	391111	Ekuitas	0	103,571,133
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	20,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	0	4,570,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	13,340,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	35,772,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	78,162,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	108,977,100	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	101,241,890	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	50,047,700	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,550,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	174,356,230	0
JUMLAH			1,634,388,401	1,634,388,401

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2026 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
WILAYAH/PROVINSI : BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl. Cetak 21/07/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	116,537,633	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	12,966,500
0.0	391111	Ekuitas	0	103,571,133
JUMLAH			116,537,633	116,537,633

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:23 AM

Halaman : 1

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	53,702,500	52,829,000	873,500	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	53,702,500	52,829,000	873,500	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	53,702,500	52,829,000	873,500	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	0	0	0	-
Beban Persediaan	174,356,230	161,584,886	12,771,344	-
Beban Barang dan Jasa	288,381,490	273,167,372	15,214,118	-
Beban Pemeliharaan	0	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	54,597,700	51,659,080	2,938,620	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:23 AM

Halaman : 2

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	517,335,420	486,411,338	30,924,082	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(463,632,920)	(433,582,338)	(30,050,582)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	-
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	-
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(463,632,920)	(433,582,338)	(30,050,582)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(463,632,920)	(433,582,338)	(30,050,582)	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	103,571,133	96,735,965	6,835,168	7.07
SURPLUS/DEFISIT-LO	(463,632,920)	(433,582,338)	(30,050,582)	6.93
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	445,332,440	421,704,452	23,627,988	5.6
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(18,300,480)	(11,877,886)	(6,422,594)	54.07
EKUITAS AKHIR	85,270,653	84,858,079	412,574	0.49

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tanggal : 24/07/26 10:38 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_uappaw_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	8,794,250
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	569,000
1010301003	Penjepit Kertas	2,181,000
1010301004	Penghapus/Korektor	583,000
1010301005	Buku Tulis	2,631,000
1010301006	Ordner Dan Map	8,036,000
1010301007	Penggaris	250,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	118,000
1010301010	Alat Perekat	3,313,000
1010301011	Stadler HD	121,000
1010301012	Staples	345,000
1010301013	Isi Staples	457,000
1010301014	Barang Cetakan	3,217,324
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	6,796,000
1010302001	Kertas HVS	13,943,000
1010302002	Berbagai Kertas	1,080,000
1010302004	Amplop	2,009,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	602,000
1010303001	Transparant Sheet	10,000
1010303002	Tinta Cetak	794,000
1010304002	Computer File/Tempat Disket	90,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	23,208,000
1010304006	USB/Flash Disk	1,700,000
1010304008	CD/DVD Drive	240,000
1010304011	CD/DVD	1,733,000
1010307006	Atribut	6,112,679
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	38,400
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	242,000
Jumlah Barang Konsumsi		89,213,653
TOTAL		89,213,653

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

NAMA UAPPAW : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tanggal : 24/07/2026 10.41.33
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : lap_crbm_n_uappaw_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPA-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:27 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPA-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:27 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPBW : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:28 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI AMORTISASI			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI AMORTISASI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:26 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-E1 : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:26 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:26 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:26 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl.Data : 24/07/26 6:37 AM
Tanggal : 24/07/26 11:04 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_uappaw_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	89,213,653
J U M L A H		89,213,653

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT WILAYAH
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2026(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tanggal : 24/07/26 11:04 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_uappaw_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	116,537,633
J U M L A H		116,537,633

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W)
SEMESTER I TAHUN 2026

Kode dan Nama UAPPAW : (005) MAHKAMAH AGUNG RI
 Kode dan Nama Eselon 1 : (03) BADAN PERADILAN UMUM
 Kode dan Nama K/L : (3000) PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MYINTRESS			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√	Sama
PENGECHEKAN PADA MYINTRESS			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	N/A	N/A
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		√
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		√
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		√
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		√
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		√
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√
a.	Pagu/DIPA		√
b.	Estimasi PNB		√
c.	Belanja		√
d.	Pengembangan Belanja		√
e.	Pendapatan		√
f.	Pengembangan Belanja		√
g.	Kas BLU		√

	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal			
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
			√	Tidak
	Daftar MYINTRESS			
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak	Ada	Tidak	Seharusnya
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Ada/Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan			
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)			
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada			
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU			
		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"	N/A	N/A	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)	N/A	N/A	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)	N/A	N/A	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)	N/A	N/A	Tidak
	Terkait Satker BLU			
		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A	N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah	N/A	N/A	
2	Apakah terdapat selisih transaksi resipokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu	N/A	N/A	Tidak

Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas				Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		√		Tidak	
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√		Tidak	
Hibah Langsung						
		Ada	Tidak	Seharusnya		
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke			√	Ada/Tidak		
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		√	Ada/Tidak		
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak		
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya		
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya		
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	Ya		
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		N/A	N/A	Ada/Tidak		
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya		
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal						
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	-				
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-				
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak		
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)						
		Ya	Tidak	Seharusnya		
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak		
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	N/A	N/A	Ya/Tidak		
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual	N/A	N/A	Ya		
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)						
		Ya	Tidak	Seharusnya		
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak		
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun	N/A	N/A	Ya/Tidak		
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk		N/A	N/A			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian						
		Ya	Tidak	Seharusnya		
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak		
PENGECEKAN NERACA						
Pengecekan Pos-pos Neraca				Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya		
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya		
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya		
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya		
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	N/A	N/A	Ya		
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	√	√	Tidak		
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya		
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak		
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL						
Pengecekan Pos-pos LO				Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak		
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak		
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak		
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya		
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak		
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak		
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak		

PENGECHEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE				
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Ya/Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	Ya	Tidak	Seharusnya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal	N/A	N/A	Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar	N/A	N/A	Ya
PENGECHEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P				
1	Terdapat saldo negatif di LRAB	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		√	Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
			√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya				
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	Ya	Tidak	Seharusnya
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		√	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akruai?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	Ya	Tidak	Seharusnya
	Jika Ya, ada realisasi akun 520XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	√	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?	N/A	N/A	Ya
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	√	Ya/Tidak
		N/A	N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akruai pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akruai	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akruai	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akruai	√		Ya/Tidak
		√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU				
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Tidak
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya

6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	N/A	N/A	Ya
LAK BLU				
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan	Ya	Tidak	Seharusnya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	N/A	N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

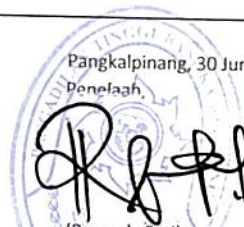
Mengetahui
Pejabat Penyusun LKRI,



(Nurkamalia)
NIP.198601222006042001

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Penelaah,



(Rosmala Sari)
NIP.198107042006042004

CETAKAN MONSAKTI

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

UAPPAW : BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG 005033000KD

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	90,554,000	53,702,500	(36,851,500)	59.30	131,561,000	52,829,000	(78,732,000)	40.16
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	90,554,000	53,702,500	(36,851,500)	59.30	131,561,000	52,829,000	(78,732,000)	40.16
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	90,554,000	53,702,500	(36,851,500)	59.30	131,561,000	52,829,000	(78,732,000)	40.16
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,077,848,000	499,034,940	(578,813,060)	46.30	1,119,100,000	474,533,452	(644,566,548)	42.4
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,077,848,000	499,034,940	(578,813,060)	46.30	1,119,100,000	474,533,452	(644,566,548)	42.4
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

UAPPAW : BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG 005033000KD

Tgl Data : 21/07/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,077,848,000	499,034,940	(578,813,060)	46.30	1,119,100,000	474,533,452	(644,566,548)	42.4
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/26 8:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	222,420,000	210,084,000	89,424,000	0	89,424,000	42.57	120,660,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	222,420,000	210,084,000	89,424,000	0	89,424,000	42.57	120,660,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	219,043,000	183,551,000	106,739,100	0	106,739,100	58.15	76,811,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	219,043,000	183,551,000	106,739,100	0	106,739,100	58.15	76,811,900
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	307,407,000	247,545,000	147,032,250	0	147,032,250	59.4	100,512,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	307,407,000	247,545,000	147,032,250	0	147,032,250	59.4	100,512,750
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	252,000,000	252,000,000	101,241,890	0	101,241,890	40.18	150,758,110
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	252,000,000	252,000,000	101,241,890	0	101,241,890	40.18	150,758,110
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139,460,000	67,300,000	50,047,700	0	50,047,700	74.37	17,252,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,900,000	10,050,000	4,550,000	0	4,550,000	45.27	5,500,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38,880,000	38,880,000	0	0	0	0	38,880,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68,438,000	68,438,000	0	0	0	0	68,438,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	261,678,000	184,668,000	54,597,700	0	54,597,700	29.91	130,070,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	39.99	578813060
	JUMLAH BELANJA	1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	46.3	578,813,060

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA/JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/26 8:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_wilayah_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG							
52	BELANJA BARANG	322,300,000	282,093,000	121,643,651	0	121,643,651	43.12	160,449,349
	Jumlah Belanja099234PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	322,300,000	282,093,000	121,643,651	0	121,643,651	43.12	160,449,349
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT							
52	BELANJA BARANG	234,080,000	206,654,000	115,374,000	0	115,374,000	55.83	91,280,000
	Jumlah Belanja099235PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	234,080,000	206,654,000	115,374,000	0	115,374,000	55.83	91,280,000
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN							
52	BELANJA BARANG	137,500,000	120,290,000	72,548,589	0	72,548,589	60.31	47,741,411
	Jumlah Belanja400601PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	137,500,000	120,290,000	72,548,589	0	72,548,589	60.31	47,741,411
402020	PENGADILAN NEGERI KOBABELANJA BARANG	133,640,000	119,216,000	50,909,500	0	50,909,500	42.7	68,306,500
52								
	Jumlah Belanja402020PENGADILAN NEGERI KOBABELANJA BARANG	133,640,000	119,216,000	50,909,500	0	50,909,500	42.7	68,306,500
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK							
52	BELANJA BARANG	121,860,000	109,112,000	53,128,000	0	53,128,000	48.69	55,984,000
	Jumlah Belanja402021PENGADILAN NEGERI MENTOK	121,860,000	109,112,000	53,128,000	0	53,128,000	48.69	55,984,000
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNGBELANJA BARANG	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800
52								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA/JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/07/26 8:22 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_wilayah_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	Jumlah Belanja663404PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800
	JUMLAH BELANJA	1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	286.17	578,813,060

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SATUAN KERJA
TINGKAT UAPPAW
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPAW : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 21/07/26 8:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	322,300,000	282,093,000	121,643,651	0	121,643,651	43.12	160,449,349
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	234,080,000	206,654,000	115,374,000	0	115,374,000	55.83	91,280,000
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	137,500,000	120,290,000	72,548,589	0	72,548,589	60.31	47,741,411
402020	PENGADILAN NEGERI KOBAS	133,640,000	119,216,000	50,909,500	0	50,909,500	42.7	68,306,500
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	121,860,000	109,112,000	53,128,000	0	53,128,000	48.69	55,984,000
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	313,168,000	240,483,000	85,431,200	0	85,431,200	35.52	155,051,800
JUMLAH		1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	47.695	578,813,060

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT UAPPAW
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPAW : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 21/07/26 8:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_uappaw_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	222,420,000	210,084,000	89,424,000	0	89,424,000	42.57	120,660,000
521211	Belanja Bahan	215,043,000	179,551,000	106,739,100	0	106,739,100	59.45	72,811,900
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	307,407,000	247,545,000	147,032,250	0	147,032,250	59.4	100,512,750
522131	Belanja Jasa Konsultan	252,000,000	252,000,000	101,241,890	0	101,241,890	40.18	150,758,110
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139,460,000	67,300,000	50,047,700	0	50,047,700	74.37	17,252,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,900,000	10,050,000	4,550,000	0	4,550,000	45.27	5,500,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,151,230,000	966,530,000	499,034,940	0	499,034,940	51.63	467,495,060
	JUMLAH RUPIAH MURNI	1,151,230,000	966,530,000	499,034,940	0	499,034,940	51.63	467,495,060
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38,880,000	38,880,000	0	0	0	0	38,880,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68,438,000	68,438,000	0	0	0	0	68,438,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH PNBP	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	TOTAL	1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	46.3	578,813,060

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT UAPPAW
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAPPAW : 005033000KD **BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG**

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 21/07/26 8:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_uappa

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1,151,230,000	966,530,000	499,034,940	0	499,034,940	51.63	467,495,060
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	1,151,230,000	966,530,000	499,034,940	0	499,034,940	51.63	467,495,060
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	1,151,230,000	966,530,000	499,034,940	0	499,034,940	51.63	467,495,060
04	PNBP							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH BELANJA PNBP	111,318,000	111,318,000	0	0	0	0	111,318,000
	JUMLAH	1,262,548,000	1,077,848,000	499,034,940	0	499,034,940	46.3	578,813,060

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD

MAHKAMAH AGUNG
BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.P.W.1
Tanggal : 21/07/26 8:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pond_akun_uappaw --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	70,000	20,000	0	20,000	28.57
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7,400,000	4,570,000	0	4,570,000	61.76
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	21,895,000	13,340,000	0	13,340,000	60.93
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	61,189,000	35,772,500	0	35,772,500	58.46
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	90,554,000	53,702,500	0	53,702,500	59.3
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	90,554,000	53,702,500	0	53,702,500	59.3
	JUMLAH PENDAPATAN	90,554,000	53,702,500	0	53,702,500	59.3

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.P.W.3
Tanggal : 21/07/26 8:06 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_uappaw

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	40,000	0	0	0	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2,310,000	1,480,000	0	1,480,000	64.07
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	7,110,000	4,330,000	0	4,330,000	60.9
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22,876,000	11,634,000	0	11,634,000	50.86
	JUMLAH PENDAPATAN (099234) - PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	32,336,000	17,444,000	0	17,444,000	43.96
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	20,000	10,000	0	10,000	50
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	3,100,000	1,650,000	0	1,650,000	53.23
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	6,645,000	4,930,000	0	4,930,000	74.19
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	18,856,000	11,714,500	0	11,714,500	62.13
	JUMLAH PENDAPATAN (099235) - PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	28,621,000	18,304,500	0	18,304,500	59.89
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10,000	0	0	0	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	990,000	860,000	0	860,000	86.87
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	5,470,000	2,570,000	0	2,570,000	46.98
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10,405,000	6,606,000	0	6,606,000	63.49
	JUMLAH PENDAPATAN (400601) - PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	16,875,000	10,036,000	0	10,036,000	49.34

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD **BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG**

Kode Lap : LRA.P.W.3
Tanggal : 21/07/26 8:06 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_uappaw

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
402020	PENGADILAN NEGERI KOB A					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10,000	0	10,000	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	520,000	490,000	0	490,000	94.23
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	1,750,000	980,000	0	980,000	56
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	4,883,000	3,181,000	0	3,181,000	65.14
	JUMLAH PENDAPATAN (402020) - PENGADILAN NEGERI KOB A	7,153,000	4,661,000	0	4,661,000	53.84
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK					
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	480,000	90,000	0	90,000	18.75
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	920,000	530,000	0	530,000	57.61
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3,389,000	2,337,000	0	2,337,000	68.96
	JUMLAH PENDAPATAN (402021) - PENGADILAN NEGERI MENTOK	4,789,000	2,957,000	0	2,957,000	48.44
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG					
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	780,000	300,000	0	300,000	38.46
	JUMLAH PENDAPATAN (663404) - PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	780,000	300,000	0	300,000	38.46
	JUMLAH PENDAPATAN	90,554,000	53,702,500	0	53,702,500	50.59

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
WILAYAH/PROVINSI : 005033000KD

MAHKAMAH AGUNG
BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Kode Lap : LRA.P.W.3
Tanggal : 21/07/26 8:21 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_uappaw

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	32,336,000	17,444,000	0	17,444,000	0.54
400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	16,875,000	10,036,000	0	10,036,000	0.59
663404	PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG	780,000	300,000	0	300,000	0.38
099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	28,621,000	18,304,500	0	18,304,500	0.64
402020	PENGADILAN NEGERI KOBAS	7,153,000	4,661,000	0	4,661,000	0.65
402021	PENGADILAN NEGERI MENTOK	4,789,000	2,957,000	0	2,957,000	0.62
JUMLAH		90,554,000	53,702,500	0	53,702,500	0.59

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

UAPPAW : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	25,300,000	0	25,300,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	936,520,248	0	936,520,248	0.00
Persediaan	89,213,653	116,537,633	(27,323,980)	(23.45)
JUMLAH ASET LANCAR	1,051,033,901	116,537,633	934,496,268	801.88
JUMLAH ASET	1,051,033,901	116,537,633	934,496,268	801.88
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	936,520,248	12,966,500	923,553,748	7,122.61
Utang Yang Belum Ditagihkan	3,943,000	0	3,943,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	25,300,000	0	25,300,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	965,763,248	12,966,500	952,796,748	7,348.14
JUMLAH KEWAJIBAN	965,763,248	12,966,500	952,796,748	7,348.14
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	85,270,653	103,571,133	(18,300,480)	(17.67)
JUMLAH EKUITAS	85,270,653	103,571,133	(18,300,480)	(17.67)
JUMLAH EKUITAS	85,270,653	103,571,133	(18,300,480)	(17.67)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,051,033,901	116,537,633	934,496,268	801.88

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	499,034,940
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	53,702,500	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	20,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	0	4,570,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	13,340,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	35,772,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	89,424,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	106,739,100	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	147,032,250	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	101,241,890	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,047,700	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,550,000	0
JUMLAH			552,737,440	552,737,440

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	25,300,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	936,520,248	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	89,213,653	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	936,520,248
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	3,943,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	25,300,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	499,034,940
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	53,702,500	0
0.0	313211	Transfer Keluar	12,316,580	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	12,316,580
0.0	391111	Ekuitas	0	103,571,133
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	20,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera	0	4,570,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	13,340,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	35,772,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	78,162,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	108,977,100	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	101,241,890	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	50,047,700	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,550,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	174,356,230	0
JUMLAH			1,634,388,401	1,634,388,401

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER 1 JANUARI 2026 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
WILAYAH/PROVINSI : BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl. Cetak 21/07/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_uappaw_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	116,537,633	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	12,966,500
0.0	391111	Ekuitas	0	103,571,133
JUMLAH			116,537,633	116,537,633

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:23 AM

Halaman : 1

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	53,702,500	52,829,000	873,500	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	53,702,500	52,829,000	873,500	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	53,702,500	52,829,000	873,500	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	0	0	0	-
Beban Persediaan	174,356,230	161,584,886	12,771,344	-
Beban Barang dan Jasa	288,381,490	273,167,372	15,214,118	-
Beban Pemeliharaan	0	0	0	-
Beban Perjalanan Dinas	54,597,700	51,659,080	2,938,620	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:23 AM

Halaman : 2

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	517,335,420	486,411,338	30,924,082	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(463,632,920)	(433,582,338)	(30,050,582)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	-
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	-
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(463,632,920)	(433,582,338)	(30,050,582)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(463,632,920)	(433,582,338)	(30,050,582)	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (005033000KD) BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 21/07/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	103,571,133	96,735,965	6,835,168	7.07
SURPLUS/DEFISIT-LO	(463,632,920)	(433,582,338)	(30,050,582)	6.93
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	445,332,440	421,704,452	23,627,988	5.6
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(18,300,480)	(11,877,886)	(6,422,594)	54.07
EKUITAS AKHIR	85,270,653	84,858,079	412,574	0.49

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tanggal : 24/07/26 10:38 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_uappaw_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	8,794,250
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	569,000
1010301003	Penjepit Kertas	2,181,000
1010301004	Penghapus/Korektor	583,000
1010301005	Buku Tulis	2,631,000
1010301006	Ordner Dan Map	8,036,000
1010301007	Penggaris	250,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	118,000
1010301010	Alat Perekat	3,313,000
1010301011	Stadler HD	121,000
1010301012	Staples	345,000
1010301013	Isi Staples	457,000
1010301014	Barang Cetak	3,217,324
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	6,796,000
1010302001	Kertas HVS	13,943,000
1010302002	Berbagai Kertas	1,080,000
1010302004	Amplop	2,009,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	602,000
1010303001	Transparant Sheet	10,000
1010303002	Tinta Cetak	794,000
1010304002	Computer File/Tempat Disket	90,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	23,208,000
1010304006	USB/Flash Disk	1,700,000
1010304008	CD/DVD Drive	240,000
1010304011	CD/DVD	1,733,000
1010307006	Atribut	6,112,679
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	38,400
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	242,000
Jumlah Barang Konsumsi		89,213,653
TOTAL		89,213,653

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA BARANG WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

NAMA UAPPAW : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tanggal : 24/07/2026 10.41.33
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : lap_crbm_n_uappaw_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPA-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:27 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPA-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:27 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPBW : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:28 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI AMORTISASI			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI AMORTISASI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-7

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:26 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-E1 : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:26 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:26 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl Data : 21/07/26 6:34 AM
Tanggal : 21/07/26 8:26 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_uappaw_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tgl.Data : 24/07/26 6:37 AM
Tanggal : 24/07/26 11:04 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_uappaw_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	89,213,653
J U M L A H		89,213,653

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT WILAYAH
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2026(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB W : 005033000KD BA(005) ES1(03) BANGKA BELITUNG

Tanggal : 24/07/26 11:04 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_uappaw_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	116,537,633
J U M L A H		116,537,633

LAMPIRAN PENDUKUNG



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN PANGKAL PINANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 663404 - PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 24/07/26 11:06

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	240,483,000	240,483,000	0
2	Belanja	85,431,200	85,431,200	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	780,000	780,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	300,000	300,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	5,000,000	5,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	5,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Juli 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN PANGKAL PINANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 402021 - PENGADILAN NEGERI MENTOK
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 24/07/26 11:06

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	109,112,000	109,112,000	0
2	Belanja	53,128,000	53,128,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	4,789,000	4,789,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,957,000	2,957,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	8,000,000	8,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	8,000,000	8,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Juli 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN PANGKAL PINANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 402020 - PENGADILAN NEGERI KOB
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 24/07/26 11:06

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	119,216,000	119,216,000	0
2	Belanja	50,909,500	50,909,500	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	7,153,000	7,153,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,661,000	4,661,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	7,500,000	7,500,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	7,500,000	7,500,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Juli 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN TANJUNG PANDAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 400601 - PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 24/07/26 11:06

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	120,290,000	120,290,000	0
2	Belanja	72,548,589	72,548,589	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	16,875,000	16,875,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	10,036,000	10,036,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	4,800,000	4,800,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	4,800,000	4,800,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17 Juli 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN PANGKAL PINANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 099235 - PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 24/07/26 11:06

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	206,654,000	206,654,000	0
2	Belanja	115,374,000	115,374,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	28,621,000	28,621,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	18,304,500	18,304,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Juli 2026





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN PANGKAL PINANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 099234 - PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 24/07/26 11:05

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	282,093,000	282,093,000	0
2	Belanja	121,643,651	121,643,651	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	32,336,000	32,336,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	17,444,000	17,444,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Juli 2026



**PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG
JL. PULAU BANGKA PEMPROV BABEL
KEL. AIR ITAM, KEC. BUKIT INTAN
PANGKALPINANG 33148**

☎ (0717) 439351 / 🖨 (0717)439352

✉ keuangan.ptbabel@gmail.com

🌐 www.pt-babel.go.id